

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL
 DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
 (Studi Empiris pada Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015)**

Noora Fahrunisah
 norafahrunisah1995@gmail.com

Achmad Badjuri
 badjuria@yahoo.com
 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus umum pada belanja modal dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Populasi penelitian ini adalah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten / Kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti Laporan Realisasi 2013 hingga anggaran 2015. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap Pengeluaran Modal. Namun, Pendapatan Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak mempengaruhi Pengeluaran Modal. Sementara Pertumbuhan Ekonomi terbukti memoderasi Pendapatan Daerah ke Belanja Modal. Tetapi Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk Pengeluaran Modal.

Kata kunci: pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran modal.

ABSTRACT

This study aimed to examines the influence of the regional revenue, general allocation funds and general special allocation funds on the capital expenditures moderated by economic growth. The population of this research are District/City Central Java Province which consists of 35 District/City. The study uses secundar data such as Realization Report 2013 until 2015 budget. The technique of data analysis is used multiple regression analysis. The results of this study shows that General Allocation Fund has a positive influence on Capital Expenditure. However, Local Revenue and Special Allocation Fund does not affect on Capital Expenditure. While Economic Growth proved to moderate Local Revenue to Capital Expenditure. But Economic Growth does not moderate the relationship between the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund to Capital Expenditures.

Keywords : local revenue, general allocation fund, special allocation fund, economic growth and capital expenditure.

PENDAHULUAN

Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah. Harapannya agar dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan

Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan

daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah.

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pada hakekatnya semangat otonomi harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proses, perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi seluruh fungsi-fungsi pemerintah yang telah desentralisasikan. Dalam kaitannya untuk mengembangkan potensi daerah pada era otonomi, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan belanja modal.

Belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin. Alokasi belanja modal didasari pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan

daerah dengan tujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor penentu belanja modal, dalam setiap penyusunan APBD alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima sehingga apabila Pemerintah Daerah ingin meningkatkan belanja modal maka pemerintah daerah harus menggali pendapatan asli daerah sebanyak-banyaknya. Hasil penelitian yang dilakukan Jaeni dkk (2016), menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja Modal. Hasil ini sependapat dengan Sugiardi dan Supadmi (2014), dan Jaya dan Dwirandra (2014). Sedangkan hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Adyatma dan Meita (2015), Nurin (2016), Agus dan Ainur (2013), dan Arbie (2013) yang menemukan bahwa Pendapatan asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Faktor lain yang mempengaruhi Belanja Modal yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensi akibat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan terjadinya transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan Adyatma dan Meita (2015), Sugiardi dan Supadmi (2014), dan Santosa dan Rofiq (2013), menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan hasil yang berbeda dari penelitian Nurin (2016) dan Arbie (2013) yang menemukan hasil bahwa Dana

Alokasi Umum (DAU) Berpengaruh negatif Signifikan.

Dana Alokasi Khusus juga mempengaruhi Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004). Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Yosea dan Handayani (2017), Agus dan Ainur (2013), dan Arbie (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian yang lain juga menemukan hasil berbeda yaitu penelitian yang dilakukan Nurin (2016) menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal. Semakin Tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaenidkk (2016), Nurin (2016) dan Adyatma dan Meita (2015) memperoleh hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan PAD dengan Belanja Modal. Sedangkan hasil yang di peroleh dalam penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014) dan Jaya dan Dwirandra (2014) Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan PAD dengan Belanja Modal.

Hasil penelitian tentang hubungan pertumbuhan ekonomi memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal yang dilakukan oleh Nurin (2016) dan Sugiardi dan Supadmi (2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan Dana

Alokasi Umum dengan Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adyatma dan Meita (2015) memiliki hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi Tidak memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Hasil penelitian pengaruh hubungan pertumbuhan ekonomi memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal yang dilakukan oleh Nurin (2016) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan tetapi memperlemah pengaruh antara Dana Alokasi Khusus pada belanja modal. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh Dana Alokasi Khusus pada belanja modal semakin menurun.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Teori Anggaran Daerah

Mardiasmo (2002:61), menyatakan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sementara anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2004), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu : Anggaran operasional dan Anggaran modal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pedoman dalam memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dalam satu daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka ada

landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Otonomi daerah selain memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri juga menuntut daerah untuk mampu memenuhi segala tuntutan dan aspirasi masyarakat daerahnya. Untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya, pemerintah daerah memerlukan infrastruktur yang memadai. Pembelanjaan ini berupa pembelanjaan asset tetap yang dikategorikan sebagai belanja modal. Untuk itu, daerah dituntut untuk memaksimalkan pemanfaatan segala potensi yang dimiliki. Semakin tinggi PAD dapat digunakan untuk mendanai pengeluaran Belanja Modal. Hasil penelitian yang dilakukan Jaeni dkk (2016), Sugiardi dan Supadmi (2014), dan Jaya dan Dwirandra (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja Modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut :

H₁: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Selain bersumber dari pendapatan asli daerah, sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan maka dibentuk dana perimbangan. Salah satu bentuk dana perimbangan tersebut adalah dana alokasi umum. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Penelitian yang dilakukan Adyatma dan Meita (2015), Sugiardi dan Supadmi(2014), dan Santosa dan

Rofiq (2013) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut :

H₂: Dana Alokasi Umum (DAU) Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus merupakan dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tidak semua daerah di Indonesia memperoleh dana alokasi khusus. Dana ini diprioritaskan untuk daerah-daerah tertentu yang memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus dialokasikan dengan tujuan untuk mempercepat perkembangan daerah tertentu serta mencapai tujuan kegiatan atau program tertentu sesuai skala nasional. Penelitian yang dilakukan Nurin (2016) menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut :

H₃ :Dana Alokasi Khusus (DAK) Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh PAD pada belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkatkan PAD dan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas

penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan PAD yang kemudian digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan dapat memoderasi hubungan PAD pada belanja modal. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut :

H₄: Pertumbuhan Ekonomi memperkuat Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan Nurin (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan dapat memoderasi hubungan DAU pada belanja modal. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut :

H₅ : Pertumbuhan Ekonomi memperkuat Dana Alokasi Umum (DAU) Berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan sumber dana dan belanja modal karena pemerintah akan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Salah satu sumber dana yang didapat oleh pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Khusus. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi di duga dapat memperkuat Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan Nurin Hidayati, 2016 menemukan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan DAK pada belanja modal. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut :

H₆ : Pertumbuhan Ekonomi memperkuat Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Modal

Model Empirik Penelitian

Model empirik penelitian dapat dilihat pada gambar 1.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 35 kab/kota di Jawa Tengah pada periode tahun 2013-2015.

Jenis dan Teknik Pengambilan data

Sumber data dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Data yang diperoleh berupa realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal dan Pertumbuhan Ekonomi. Kab/Kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini

dipilih menggunakan metode studi pustaka dan metode dokumentasi.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Belanja Modal

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja modal. Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya terdapat pengeluaran untuk pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset. Belanja Modal diukur dalam rupiah dari laporan realisasi APBD kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel independen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$PAD = PD + RD + LPD + PLS$$

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang - undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa DAU merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar – daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian ini mengacu pada penelitian Adyatma dan Meita (2015). Dana Alokasi Umum dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel independen. Dana Alokasi Umum diukur dalam satuan

rupiah yang diperoleh dari jumlah Dana Alokasi Umum dari realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK merupakan dana transfer yang peruntukannya sudah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan dengan arah kegiatan pada bidang tertentu yang dipergunakan untuk 19 Bidang. Dana alokasi Khusus dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel independen. Dana Alokasi Khusus diukur dalam satuan rupiah yang diperoleh dari jumlah Dana Alokasi khusus dari realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pertumbuhan Ekonomi

Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Boediono, 1985). Penelitian ini mengacu pada penelitian Adiyatma dan Meita (2016). Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Produk Domestik Regional Bruto perkapita adalah salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat.

Metode Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi yang akan diuji yaitu:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 PAD * PDRB + \beta_5 DAU * PDRB + \beta_6 DAK * PDRB$$

Keterangan :

BM = Belanja Modal

α	= Konstanta	
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$	= Koefisien masing-masing variabel independen	
PAD	= Pendapatan Asli Daerah	
DAU	= Dana Alokasi Umum	
DAK	= Dana Alokasi Khusus	
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto	
PAD*PDRB	= Interaksi antara PAD dengan PDRB	
DAU*PDRB	= Interaksi antara DAU dengan PDRB	
DAK*PDRB	= Interaksi antara DAK dengan PDRB	
e	= error	

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 74.339.697.000 rupiah yaitu kabupaten Blora pada tahun 2015, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 1.138.364.451.000 rupiah yaitu kota Semarang pada tahun 2014. PAD kabupaten dan kota Semarang di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2013-2015 memiliki nilai rata-rata sebesar 234.087.738.16 rupiah dengan deviasi sebesar 161.648.910,299 rupiah. (dapat dilihat pada tabel 1).

Berdasarkan data Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 358.331.867.000 rupiah yaitu kota Salatiga pada tahun 2013, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 1.332.536.848.000 rupiah yaitu kabupaten Cilacap pada tahun 2015. DAU kabupaten dan kota Semarang di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2013-2015 memiliki nilai rata-rata sebesar 848.228.677,286 rupiah dengan deviasi sebesar 226.364.209,6709 rupiah. (dapat dilihat pada tabel 1).

Berdasarkan data Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 3.750.100.000 rupiah yaitu kota Surakarta pada tahun 2015, sedangkan data

yang paling tinggi sebesar 810.216.582.000 rupiah yaitu kabupaten Karanganyar pada tahun 2013. DAK kabupaten dan kota Semarang di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2013-2015 memiliki nilai rata-rata sebesar 76.882.097,895 rupiah dengan deviasi sebesar 82.481.549,970 rupiah. (dapat dilihat pada tabel 1).

Berdasarkan data Belanja Modal (BM) dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 51.80.727.000 rupiah yaitu kabupaten Rembang pada tahun 2015, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 1.349.349.490.000 rupiah yaitu kota Semarang pada tahun 2015. Belanja Modal kabupaten dan kota Semarang di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2013-2015 memiliki nilai rata-rata sebesar 261.858.621,952 rupiah dengan deviasi sebesar 158.758.956,299 rupiah. (dapat dilihat pada tabel 1).

Berdasarkan data Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar 4.755.092.203.000 rupiah yaitu kota Magelang pada tahun 2013, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 109.088.689.605.000 rupiah yaitu kota Semarang pada tahun 2015. PDRB kabupaten dan kota Semarang di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2013-2015 memiliki nilai rata-rata sebesar 21.856.255.084,464 rupiah dengan deviasi sebesar 20.470.679.539,729 rupiah. (dapat dilihat pada tabel 1).

Uji Normalitas

Uji normalitas data memiliki tujuan yaitu untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi yang normal. Secara statistik terdapat dua komponen normalitas yaitu skewness dan kurtosis (Ghozali, 2011). Persyaratan dari uji normalitas data yaitu untuk alpha 0,05 nilai kritisnya $\pm 1,96$ (Ghozali, 2011). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 2:

Berdasarkan Hasil pengujian normalitas setelah mengeluarkan *outlier* sebanyak 14 data (dapat dilihat pada tabel 2). Hasil tersebut diperoleh dengan nilai *skewness* sebesar $0,93 <$

1,96 dan nilai *kurtosis* sebesar $-0,84 < 1,96$ (dengan signifikan pada 0,05), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diolah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) yang satu dengan yang lainnya. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance ≤ 0.10 dan $VIF \geq 10$. Berdasarkan hasil output yang dapat dilihat pada tabel 3 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance $< 0,10$. Sedangkan Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai $VIF > 10$. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas (independen) dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan Uji Run Test dapat dilihat pada tabel 4 menunjukkan bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) dalam uji runstest sebesar 0,171 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dalam uji runs test tidak mengalami autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji *glejser*. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* dapat dilihat pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel-variabel independen

memiliki nilai probabilitas atau signifikansi $> 0,05$; maka model tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk mengukur apakah semua variabel independen yang dimaksudkan dalam model dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output dengan *significance* level 0.05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil output tabel anova yang dapat dilihat pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 30,478 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 (lebih kecil dari nilai 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, DAK, PAD_PDRB, DAU_PDRB, dan DAK_PDRB terhadap BM adalah model yang layak atau *fit*.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil output tabel model summary yang dapat dilihat pada tabel 7 menunjukkan bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,663 yang berarti variabilitas variabel dependen (Belanja Modal) yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (PAD, DAU, DAK, PAD_PDRB, DAU_PDRB, dan DAK_PDRB) sebesar 66,3% sedangkan sisanya 33,7% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini, uji model untuk pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). MRA merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan mengandung

unsur interaksi, yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen (Ghozali, 2011:150).

Berdasarkan tabel 8 di atas, diperoleh persamaan matematis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BM} = & 42387086,594 - 0,268 \text{ PAD} + \\ & 0,152 \text{ DAU} + 1,241 \text{ DAK} \\ & 2,468\text{E-}011 \text{ PAD*PDRB} - \\ & 5,163\text{E-}012 \text{ DAU*PDRB} + \\ & 1,265\text{E-}011 \text{ DAK*PDRB} + e \end{aligned}$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal

PAD diperoleh nilai beta korelasi sebesar - 0,268 dengan signifikan sebesar 0,163 sehingga $> 0,05$. Dengan demikian secara persial H_1 **ditolak**.

Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi atau rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan belum tentu menaikkan atau menurunkan Belanja Modal yang dialokasikan oleh daerah tersebut, hal ini bisa saja terjadi karena Pendapatan Asli Daerah di alokasikan ke belanja selain Belanja Modal seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja tidak langsung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tolu dkk (2016) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal

DAU diperoleh nilai beta korelasi sebesar 0,152 dengan signifikan sebesar 0,039 sehingga $< 0,05$. Dengan demikian secara persial H_2 **diterima**.

Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pengaruh signifikan ini menandakan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat maka akan semakin tinggi juga Belanja Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1995 yang telah diperbarui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa Dana Alokasi Umum di gunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiyatma dan Meita (2015), Sugiardi dan Supadmi (2014), Santosa dan Rofiq (2013) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal

DAK diperoleh nilai beta korelasi sebesar 1,241 dengan signifikan sebesar 0,090 sehingga $> 0,05$. Dengan demikian secara persial H_3 **ditolak**.

Dana Alokasi Khusus menunjukkan positif tidak signifikan terhadap belanja modal. DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, yang artinya semakin tinggi atau rendah Dana Alokasi Khusus yang digunakan, maka belum tentu juga menaikkan atau menurunkan Belanja Modal. Hal ini bisa saja terjadi jika Belanja Modal tinggi dan Dana Alokasi rendah maka Belanja Modal yang tinggi itu belum tentu didanai dari Dana Alokasi Khusus melainkan dari Pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri seperti pendapatan dari pajak atau retribusi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak ada keterkaitan dengan Belanja Modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaeni dkk (2016) menemukan bahwa dana alokasi khusus mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal.

Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

PAD*PDRB diperoleh nilai beta korelasi sebesar 2,468E-011 dengan signifikan sebesar 0,007 $< 0,05$. Dengan demikian secara persial H_4 **diterima**.

Pertumbuhan Ekonomi mampu memperkuat hubungan antara Pendapatan Asli

Daerah terhadap Belanja Modal, yang artinya bahwa apabila Pertumbuhan Ekonomi meningkat dan disertai dengan Pendapatan Asli Daerah daerah yang semakin tinggi, maka semestinya mampu meningkatkan Belanja Modal suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktifitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin meningkat pendapatan yang di peroleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga akan meningkatkan sumber penerimaan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terutama pada Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan Belanja Modal.

Temuan ini sejalan dengan Sugiardi dan Supadmi (2014) serta Jaya dan Dwirandra (2014) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

DAU*PDRB diperoleh nilai beta korelasi sebesar $-5,163E-012$ dengan signifikan sebesar $0,216 > 0,05$. Dengan demikian secara persial H_5 ditolak.

Pertumbuhan Ekonomi memperlemah pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi Belanja Modal, yang artinya semakin meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi belum tentu juga akan semakin tinggi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena meskipun dengan adanya pembagian hasil Dana Alokasi Umum yang tinggi belum tentu Pemerintah Daerah akan menggunakannya untuk memenuhi keperluan belanja modal daerahnya.

Apabila daerah kurang mampu mengelola dana tersebut, maka tidak menutup kemungkinan pemanfaatan Dana Alokasi Umum yang dominan dialokasikan untuk belanja pegawai daerah sehingga dapat berdampak pada berkurangnya alokasi belanja modal. Hal tersebut tentu berimplikasi pada terjadinya peningkatan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, kurangnya kemandirian daerah, dan munculnya ketidakpuasan masyarakat di daerah dan sebagai Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi pada masing-masing wilayah. Adanya kesenjangan ini mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi memperlemah Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini sejalan dengan Adiyatma dan Meita (2015) yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi memoderasi hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

DAK*PDRB diperoleh nilai beta korelasi sebesar $1,265E-011$ dengan signifikan sebesar $0,2751 > 0,05$. Dengan demikian secara persial H_6 ditolak.

Pertumbuhan Ekonomi memperlemah Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Modal, yang artinya Semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka belum tentu juga akan meningkatkan Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena Belanja Modal tinggi dan Dana Alokasi Khusus rendah maka Belanja Modal yang tinggi itu belum tentu didanai dari Dana Alokasi Khusus melainkan dari Pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri seperti pendapatan dari pajak atau retribusi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak ada keterkaitan dengan Belanja Modal. Jika suatu daerah telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan pemerintah daerah akan meningkat sehingga tingkat pengalokasian Belanja

Modalnya juga akan naik tetapi DAK yang rendah tidak dapat digunakan untuk mendanai Belanja Modal. Sehingga Pertumbuhan Ekonomi memperlemah pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Temuan ini bertolak belakang dengan Nurin (2016) menemukan bukti empiris Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.
4. Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
5. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
6. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Keterbatasan Penelitian

1. Objek penelitian ini terbatas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Periode penelitian hanya 3 tahun yaitu dari tahun 2013-2015.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sebagian kecil komponen APBD yaitu PAD, DAU, DAK, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal.

Implikasi

1. Pemerintah Daerah lebih memperhatikan alokasi anggaran dari dana PAD, diupayakan anggaran PAD dialokasikan lebih dominan kepada Belanja Modal yang memberikan implikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah Pusat diharapkan dapat meningkatkan porsi Dana Alokasi Umum

dan Dana Alokasi Khusus kepada Pemerintah Daerah, Sehingga dana tersebut dapat dialokasikan sesuai tujuan dari masing-masing Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khususnya.

3. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mengutamakan alokasi belanja modal yang diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga mampu mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian Provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode tahunnya dan sesuai dengan tahun terbaru agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel karena pada penelitian ini variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 63,3% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya, terkait komponen APBD yang belum dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan model penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, Erdi ; Rachmawati Meita Oktaviani. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* , Vol. 4, No.2.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Boediono, (1985). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta : BPFE.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia, Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, Makalah disajikan pada Seminar

- Antarbangsa di Universitas Hassanudin, Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Ghozali, Imam. (2011). *Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2009. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Handayani, Dwi dan Elva Nuraini. 2012. Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Volume 1, Nomor 1.
- Hidayati, Nurin. 2016. Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jaeni, Greg. Anggana L. 2016. Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *Jurnal Pengembangan IPTEKS*, Unisbank Semarang.
- Jaya dan Dwirandra. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1* (2014):79-92.
- Kawedar, Warsito dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang UNDIP.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyani, Sri. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai moderasi. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Nugraha, I Putu Bagus Indra Mulia dan A. A. N. B Dwirandra. 2016. Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DBH pada Belanja Modal. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.14, No.1.
- Nuarisa, Ardhian, Sheila; 2013. Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No. 1.
- Peraturan Pemerintahan dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pradana, Eka, Yosea; Nur Handayani. 2017. Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Beanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 3.
- Santosa, Budi, Agus; Mohamad Ainur Rofiq. 2013. Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal. *Jurna Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 20, No. 2.
- Sugiarthi dan Supadmi. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2* (2014): 477-495.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tolu, Andri; Walewangko, Een N; Tumangkeng, Steeva Y.L. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kota Bitung). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 02.
- UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wandira, Gugus, Arbie; 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No. 1.

<https://jateng.bps.go.id/>

<https://www.scribd.com/doc/68354866/Teori-Anggaran-dan-Sistem-Anggaran>

<http://agil-asshofie.blogspot.co.id/2011/11/otonomi-daerah-menurut-uu-no-32-tahun.html>

<https://jateng.merdeka.com/ukm/empat-tahun-terakhir-pertumbuhan-perekonomian-jateng-lampau-nasional-170810x.html>

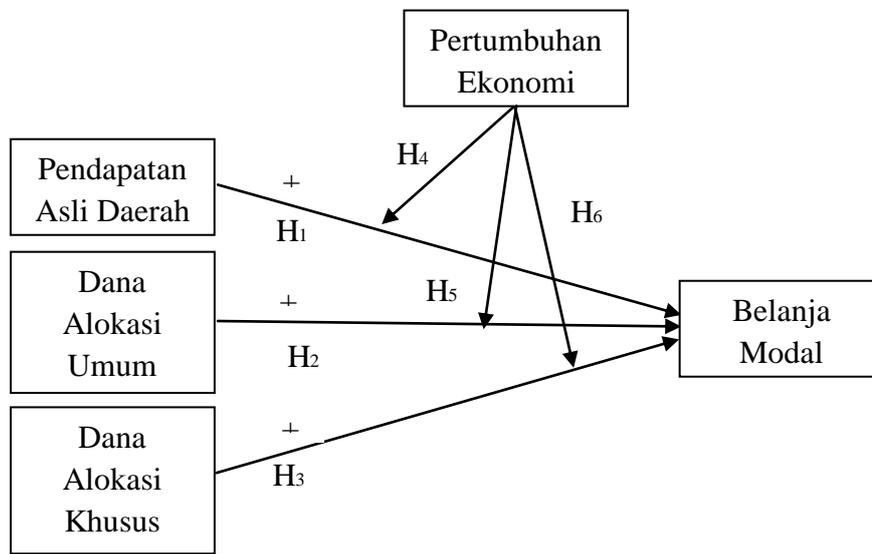
<https://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/19/dana-alokasi-khusus-dak/>

<https://idtesis.com/pengaruh-pendapatan-asli-daerah-dana-alokasi-umum-dan-dana-alokasi-khusus/>

LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 1

Model empirik penelitian



LAMPIRAN TABEL

Tabel 1

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	105	74339697	1138364451	234087738,16	161648910,29
DAU	105	358331867	1332536848	848228677,28	226364209,67
DAK	105	3750100	810216582	76882097,89	82481549,97
BM	105	51980727	1349349490	261858621,95	158758956,29
PDRB	105	4755092203	109088689605	21856255084,46	20470679539,72
Valid N (listwise)	105				

Tabel 2

Uji Normalitas

Descriptive Statistics

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	91	,240	,253	-,431	,500
Valid N (listwise)	91				

Tabel 4

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	,751	1,331
	DAU	,478	2,094
	DAK	,591	1,693
	PDRB	,739	1,352

a. Dependent Variable: BM

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	1317505,96903
Cases < Test Value	45
Cases >= Test Value	46
Total Cases	91
Number of Runs	40
Z	-1,369
Asymp. Sig. (2-tailed)	,171

a. Median

Tabel 6
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	37156198,872	12828371,452		2,896	,005
PAD	-,132	,100	-,379	-1,320	,190
DAU	,037	,038	,304	,960	,340
1 DAK	-,265	,379	-,287	-,698	,487
PAD_PDRB	2,705E-012	,000	,338	,581	,563
DAU_PDRB	-2,044E-012	,000	-,787	-,942	,349
DAK_PDRB	2,971E-011	,000	,902	1,428	,157

a. Dependent Variable: ABRES

Tabel 7
Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	407772660013264830	6	67962110002210808,	30,478	,000 ^b
1 Residual	187306658800647232	84	2229841176198181,2		
Total	595079318813912060	90			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DAK_PDRB, PAD, DAU, DAK, PAD_PDRB, DAU_PDRB

Tabel 8
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,828 ^a	,685	,663	47221194,1420	1,550

a. Predictors: (Constant), DAK_PDRB, PAD, DAU, DAK, PAD_PDRB, DAU_PDRB

b. Dependent Variable: BM

Tabel 9
Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	42387086,594	24460911,585		1,733	,087
PAD	-,268	,191	-,246	-1,407	,163
DAU	,152	,073	,406	2,101	,039
1 DAK	1,241	,723	,430	1,716	,090
PAD_PDRB	2,468E-011	,000	,987	2,782	,007
DAU_PDRB	-5,163E-012	,000	-,635	-1,248	,216
DAK_PDRB	1,265E-011	,000	,123	,319	,751

a. Dependent Variable: BM